

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Supina Sino, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat. Alat analisis yang digunakan yaitu analisa rasio keuangan daerah (rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan PAD).

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat mengalami peningkatan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013?”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013-2014, hanya mengalami kenaikan satu kali sebesar **2,59%** yaitu 7,07%-4,48%, rasio efektifitas pemerintah daerah tahun 2013-2014 pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, mengalami penurunan sebesar **-17%** yaitu 106,20%-123,20%, rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar **-6,21%** yaitu 47,85%-54,06%, rasio pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar **20,08%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis yang penulis kemukakan *ditolak*.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua

urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemda. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otoda. Tujuan program otoda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Hasil analisis rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi sebab kebijakan ini

yang memberikan keleluasaan bagi Pemda untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Peneliti memilih salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat**”.

II. DASAR TEORI

Menurut Sadeli (2006 : 2), adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat, mempertimbangkan dan mengambil keputusan bagi para pemakai tersebut.”

Accounting Principles Board (1970) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi, membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif tindakan.”

Sedangkan menurut Gade (2008:17):

“ Akuntansi adalah ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus menerus menurut sistem tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat tersusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan instansi atau lembaga terhadap kinerjanya.”

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (No. 476/KM/K.01/1991):

“Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.”

Pengertian Keuangan dikemukakan oleh Ridwan dan Inge (2008:2), “keuangan adalah ilmu sekaligus seni pengelolaan uang yang berpengaruh pada kehidupan individu maupun organisasi. Dalam pengertian ini, keuangan berkaitan dengan proses, instrument, pasar serta lembaga apapun yang terlibat

didalam perpindahan atau transfer uang, baik antar perorangan, bisnis, maupun pemerintah.”

- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non-keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”.

Adapun menurut Sucipto (2005:) menyatakan bahwa definisi “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.”

Dari definisi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Jusup (2005 : 11) bahwa “Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan laporan untuk kepentingan pihak luar”

Zaki Baridwan (2009 : 17), “Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan atau transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.”

Sugianto dan Winarni (2005:111) menyatakan bahwa “Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.”

Agnes Sawir (2005:6) bahwa definisi “Kinerja Keuangan adalah penilaian kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah ratio dan indeks,

yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.”

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran Kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non-keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi”.

Sucipto (2005:) menyatakan bahwa definisi “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.”

Dari definisi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

III. METODE PENELITIAN

Alat Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisa laporan keuangan daerah yaitu:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah
$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat \& Pinjaman}}$$

b. Rasio efektifitas Pendapatan Daerah (PAD)
$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{By.Yg dikeluarkan utk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan PAD
$$\text{PAD} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$$

Dimana : t_0 = tahun sebelumnya
 t_1 = tahun akhir

Uji Hipotesis

Hipotesis *diterima* jika :

- Rasio kemandirian 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013.
- Rasio efektivitas 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013.
- Rasio efisiensi 2014 mengalami kenaikan dibandingkan 2013.
- Rasio pertumbuhan 2014 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2013.

Sebaliknya, *hipotesis ditolak* jika :

- Rasio kemandirian 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013.
- Rasio efektivitas 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013.
- Rasio efisiensi 2014 mengalami penurunan dibandingkan 2013.
- Rasio pertumbuhan 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk membandingkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun

2013 dan 2014 dengan menggunakan analisa laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Daerah Kutai Barat, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio kemandirian juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya

$$\text{Rasio Kemandirian Keu. Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Berikut adalah tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yaitu :

Tabel 5.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2014

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rasio Kemandirian
2013	Rp. 88.616.089.135,38	Rp. 1.768.419.499.473,00	Rp. 210.431.600.000;	4,48%
2014	Rp.106.406.970.634,35	Rp. 1.295.021.217.664,00	Rp. 210.813.700.000;	7,07%

Sumber : Data Diolah 2015

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektivitas*

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Berikut adalah perhitungan rasio efektifitas PAD Pemerintah Daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, yaitu :

Tabel 5.2 : Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Sekretariat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013-2014

Tahun	Target Penerimaan Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektifitas
2013	Rp 71.929.287.251,82	Rp. 88.616.089.135,38	1,23%
2014	Rp 100.192.488.408,02	Rp. 106.406.970.634,35	1,06%

Sumber : Data Diolah 2015

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Adapun perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3 : Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Sekretariat Kutai Barat Tahun Anggaran 2013-2014

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Biaya Pemungutan PAD	Rasio Efisiensi
2013	Rp. 88.616.089.135,38	Rp.47.908.275.000,00	54,06%
2014	Rp. 106.406.970.634,35	Rp.50.919.152.693,00	47,85%

Sumber : Data Diolah 2015

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan

pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

dimana: t_0 = tahun awal

t_1 = tahun akhir

Berikut adalah tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan APBD Sekretariat Kabupaten Kutai Barat :

Tabel 5.4 : Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Sekretariat Kutai Barat Tahun 2013-2014

Tahun	PAD _{t0}	PAD _{t1}	Rasio Pertumbuhan
2013-2014	Rp.88.616.089.135,38	Rp.106.406.970.634,35	20,08%

Sumber : Data Diolah 2015

Berdasarkan analisis di atas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka dapat dibahas sebagai berikut:

Tabel 5.4 : Rekap Rasio Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat 2013-2014

Rasio	Tahun 2013	Tahun 2014
Kemandirian	4,48%	7,07%
Efektivitas	1,23%	1,06%
Efisiensi	54,06%	47,85%
Pertumbuhan	28,08%	

Kemandirian	4,48%	7,07%
Efektivitas	1,23%	1,06%
Efisiensi	54,06%	47,85%
Pertumbuhan	28,08%	

Sumber : Data diolah 2015

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada tabel 5.1 di atas, diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013-2014, hanya mengalami kenaikan satu kali sebesar 2,59% yaitu 7,07%-4,48%. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah terutama dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Hal menunjukkan bahwa begitu besarnya peran pajak dan retribusi daerah dalam pembangunan baik pusat maupun daerah.

2. Rasio Efektifitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.2 di atas, maka dapat dilihat bahwa rasio efektifitas pemerintah daerah tahun 2013-2014 pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, mengalami penurunan sebesar -17% yaitu 106,20%-123,20%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD mengalami penurunan karena kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya kurang dari 1% atau di bawah 100%.

3. Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.3 di atas, maka dapat dilihat bahwa rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar -6,21% yaitu 47,85%-54,06%. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima kurang dari 1% atau di bawah 100%.

4. Rasio Pertumbuhan PAD

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan pada tabel 5.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 20,08% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan

demikian, maka *hipotesis* yang penulis kemukakan *ditolak*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Rasio kemandirian keuangan daerah pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2014 mengalami kenaikan.
2. Rasio efektifitas Pendapatan Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2104 mengalami penurunan.
3. Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat mengalami penurunan.
4. Rasio Pertumbuhan PAD pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat mengalami kenaikan sebesar **20,08%** pada tahun 2013-2014.
5. Hipotesis *ditolak*, karena tidak semua indikator penilaian (rasio kinerja keuangan daerah) mengalami peningkatan secara signifikan.

Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya terus mempertahankan serta meningkatkan semua indikator penilaian dalam kinerja keuangan daerah.
2. Pemerintah daerah hendaknya terus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, efisiensi PAD dan pertumbuhan PAD.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 **Tentang Pemerintah Daerah**.
- _____, Undang-undang No.33 Tahun 2008 **Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**.
- _____, 2012, **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah**, Kabupaten Kutai Barat.
- Jusup, AL. Haryono, 2005, **Dasar-Dasar Akuntansi**, STIE YKPN, Yogyakarta, Jilid I, Edisi Lima.
- Mardiasmo, 2009, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta.
- Munawir, S, 2007, **Analisa Laporan Keuangan**, Liberty, Yogyakarta, Edisi Revisi.

